



**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN TAHUN 2021
BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS**

[BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA]

Jl. Dr. Soeparno No 32 Purwokerto Telp./Fax : 0281 636079 website : bkpsdm.banyumaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2021, Renja ini sebagai penjabaran dari aktivitas kegiatan selama satu tahun dan merupakan amanat dari Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

1. RPJPD;
2. RPJMD ;
3. Renstra SKPD;
4. RKPD; dan
5. RENJA SKPD

Rencana Kerja ini memuat beberapa hal terkait dengan rencana yang akan dilakukan pada tahun 2021 diantaranya adalah

- a. Program dan kegiatan;
- b. Lokasi kegiatan;
- c. Indikator kineija;
- d. Kelompok sasaran;
- e. Pagu indikatif dan prakiraan maju.

Semoga dengan adanya dokumen rencana kerja ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan penyusunan kegiatan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas, sehingga dapat menghasilkan output dan outcome sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS**



Drs. ACHMAD SUPARTONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19620708 198503 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah di ubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana untuk melaksanakan urusan yang dimanakan dalam undang-undang tersebut kedaerah maka melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 maka Renja dapat dilakukan perubahan dikarenakan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2021, sehingga telah dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2021. Ketidakesuaian ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan nasional (RPJMN Tahun 2019-2024) dan kondisi pandemi Covid 19 sehingga kemudian telah dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan dijabarkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas tahun 2021 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023. Renja Perubahan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas tahun 2021 memuat tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2019. Adapun program dalam Renja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas adalah mengacu pada program sesuai dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Banyumas periode tahun 2018 – 2023 maka sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 kepala Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan yang merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah mewujudkan Tujuan, Sasaran, melalui Strategi, kebijakan, dengan melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas yang memedomani pada Renstra Perubahan SKPD 2018-2023 sebagai perencanaan jangka menengah SKPD selama 5 tahun dengan menyelaraskan RPJM Daerah 2018-2023 dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apaatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas, Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan rencana kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas adalah untuk menyiapkan rencana kerja tahunan, Tahun Anggaran 2021 yang merupakan penjabaran dari Renstra Perubahan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023.
- b. Tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas adalah untuk memberikan arah kebijakan perencanaan pembangunan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada tahun anggaran 2021 dan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2 Program dan Kegiatan

Bab V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas mencoba mengevaluasi dengan mengkaji dan menelaah hasil capaian kinerja antara realisasi pelaksanaan, rencana kerja dengan capaian Renstra SKPD yang sudah di tetapkan, serta prakiraan capaian pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun 2020 dengan tabel sebagai berikut :

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perubahan SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4	4	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1	1	1	1	100%	1	1	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	1299 orang	0	0	0	0	433 orang	433	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	8 orang	0	0	0	0	8 orang	8 orang	100 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	6 jenis	0	0	0	0	6 jenis	6 jenis	100 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	5 jenis	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	5 jenis	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	12 bulan	0	0	0	0	12 bulan	12 bulan	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	2 jenis	0	0	0	0	2 jenis	2 jenis	100 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	24 kali	0	0	0	0	24 kali	24 kali	100 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	3 jenis	0	0	0	0	3 jenis	3 jenis	100 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	12 bulan	0	0	0	0	12 bulan	12 bulan	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	2	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	10 orang	100%	10 orang	10 orang	100%	10 orang	10 orang	100 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	3 jenis	0	0	0	0	3 jenis	3 jenis	100 %
Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	10	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	8 unit	0	0	0	0	2 jenis	2 jenis	100 %

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	4 unit	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	5 jenis	100 %	5 jenis	5 jenis	100 %	5 jenis	5 jenis	100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	15 unit	100 %	15 unit	15 unit	100 %	15unit	15 unit	100 %
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	75 unit	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	60 unit	100 %	60 unit	60 unit	100 %	10 unit	10 unit	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	2 unit	100 %	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	2 unit	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	45 unit	100 %	10 unit	10 unit	100 %	10 unit	10 unit	100 %
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	95%	0	0	0	0	95%	95%	100%
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang mengisi formasi jabatan sesuai penetapan formasi menpan RB	1400 orang	100 %	377 orang	377 orang	100 %	400 orang	400 orang	100 %
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah formasi yang tersedia	1500 formasi	0	0	0	0	500 formasi	500 formasi	100 %

Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	1500 sk	0	0	0	0	500 sk	500 sk	100 %
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian yang tersedia	1 aplikasi	0	0	0	0	1 aplikasi	1 aplikasi	100 %
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah arsip kepegawaian yang dikelola	11.000 arsip	0	0	0	0	11.000 arsip	11.000 arsip	100 %
Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi dan dipromosikan	500 orang	0	0	0	0	500 orang	500 orang	100 %
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi Pegawai yang diterbitkan	600 sk	0	0	0	0	200 sk	200 sk	100 %
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	5400 sk	0	0	0	0	1800 sk	1800 sk	100 %
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah kekosongan JPTP yang terisi	14 jabatan	0	0	0	0	3 jabatan	3 jabatan	100 %
Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	1200 orang	0	0	0	0	400 orang	400 orang	100 %
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Tugas Belajar, Ijin Belajar, Ijin Penggunaan Gelar)	900 orang	0	0	0	0	200 orang	200 orang	100 %
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK Pejabat Fungsional yang terbit	1.050 sk	0	0	0	0	350 sk	350 sk	100 %
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang nilai SKP nya baik	11.000 orang	0	0	0	0	11.000 orang	11.000 orang	100 %
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengirimkan evaluasi kinerja	30.000 orang	0	0	0	0	10.000 orang	10.000 orang	100 %
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen kegiatan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang disusun	1 dokumen	0	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah pegawai yang menerima	450 orang	0	0	0	0	150 orang	150 orang	100 %

	penghargaan								
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin ASN yang dilaksanakan	30 keg	0	0	0	0	10 keg	10 keg	100 %
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah SK Pelanggaran Disiplin ASN yang diterbitkan	30 sk	0	0	0	0	10 sk	10 sk	100 %
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah SK Izin Perceraian Pegawai yang diterbitkan	120 sk	0	0	0	0	40 sk	40 sk	100 %
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Prosentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan kebutuhan	2,4%	0	0	0	0	0.8 %	0.8 %	100 %
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Manajerial dan Fungsional	200 orang	0	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang lulus penyelenggaraan Diklat Manajerial dan Fungsional	837 orang	0	0	0	0	60 orang	60 orang	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ,
terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian
4. Bidang Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
5. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Mutasi
 - b. Sub Bidang Kepangkatan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi
6. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN
 - b. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan ASN

Capaian Kinerja BKPSDM

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Kinerja RKPD Tahun 2020		Prosentase Kinerja RKPD 2020	Status Capaian 2020	Kondisi Kinerja	Prosentase Kinerja RPJM s.d. Tahun 2020
				Target 2020	Capaian Kinerja 2020			Target Kinerja Akhir RPJM	
1	Indeks Profesionalitas ASN		83,1	83,4	67,48	80,91	▼	83,70	97.59
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	jabatan	189	189	100	100	●	100	100
3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jabatan	31	31	100	100	●	31	100
4	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	%	90	84	84	100	●	95	100
5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0.90	0.064	0.02	31.25	▼	0,378	31.25

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan tahun 2020 dari 5 target indikator, ada 2 target indikator perlu perhatian/upaya keras.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi secara luas, terlebih pada konteks global, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam konteks Kabupaten Banyumas saat ini dan ke depan, Optimalisasi kinerja birokrasi dan pelayanan publik Kualitas kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja, manajemen kelembagaan dapat ditingkatkan melalui pembenahan tata laksana organisasi sedangkan penguatan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi informasi (TI). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka isu-isu strategis yang harus ditangani Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran aparatur atas pentingnya revolusi mental dan peningkatan pelayanan publik yang profesional melalui pengembangan inovasi teknologi informasi kepegawaian;
2. Peningkatan budaya disiplin, dan taat hukum dikalangan aparatur melalui konsistensi penanganan kasus pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum;
3. Penataan dan optimalisasi kelembagaan instansi pemerintah daerah melalui penempatan pegawai yang profesional dan proporsional, Assesment dan pengembangan kompetensi;
4. Peningkatan kompetensi dan sumberdaya aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan.

2.4. Review Terhadap Renja BKPSDM Tahun 2021

Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, maka diperlukan penyesuaian terhadap indikator kinerja BKPSDM. Dalam hal ini, BKPSDM telah melakukan reviu terhadap indikator kinerja sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri 050 - 3708 Tahun 2020 serta Perubahan Renstra yang terlihat dalam matrik sebagai berikut:

EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DAN INDIKATOR ANTARA RPJMD KAB. BANYUMAS TAHUN 2018 - 2023 DAN PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI 90

Nama OPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bidang Urusan / Kode : KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006				PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI 90			KESELARASAN			REKOMENDASI INDIKATOR BARU	ALASAN / KETERANGAN
NO	Program	Indikator Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	YA	KURANG	TIDAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Peningkatan Tata Kelola Informasi ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi		Program Kepegawaian Daerah					√	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	
		Persentase data ASN yang akurat	Pengadaan Pegawai		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				√	Jumlah ASN yang mengisi formasi jabatan sesuai penetapan formasi menpan RB	
						Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				Jumlah usulan jabatan yang disusun	
						Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			√	Jumlah formasi yang tersedia	
			Pemrosesan Pensiun dan Penataan PNSD			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			√	Jumlah SK Pensiun yang terbit	
			Akurasi Data Pegawai			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			√	Jumlah aplikasi kepegawaian yang tersedia	

			Pengelolaan arsip CPNS dan PNS			Pengelolaan Data Kepegawaian			√	Persentase data pegawai yang up to date	
2	Program Penataan Jabatan, Kepangkatan dan Pengembangan Karir ASN	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan			Mutasi dan Promosi ASN					Jumlah ASN yang dimutasi dan dipromosikan	
						Pengelolaan Mutasi ASN			√	Jumlah SK Mutasi Pegawai	
			Pemrosesan Kenaikan Pangkat			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			√	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terbit	
			Pemrosesan Jabatan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi			Pengelolaan Promosi ASN			√	Jumlah jabatan yang terisi	
			Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki JPTP dan Jabatan Administrasi								
					Pengembangan Kompetensi ASN					Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	
						Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			√	Jml PNS yang dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Ijin Belajar, Ijin Penggunaan Gelar)	

						Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			√	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar	
						Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN			√	Jumlah evaluasi diklat	
					Pemrosesan Jabatan Fungsional	Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional			√	Jumlah SK Jabatan Fungsional yang terbit	
3	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	Persentase ASN yang berkinerja baik	Penilaian Kinerja ASN		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					Jumlah ASN yang nilai ASN nya baik	
						Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			√	Jumlah Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang tersusun	
		Persentase ASN yang memperoleh hukuman disiplin tingkat berat				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			√	Persentase pegawai yang mengirimkan laporan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	
						Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			√	Jumlah kegiatan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	
			Penghargaan ASN			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			√	Jumlah pegawai yang menerima penghargaan	
						Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai			√	Jumlah pegawai yang menerima tanda jasa	

						Evaluasi Pelaksanaan Pemberiaan Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			√	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa apatur	
			Pembinaan dan Penyelesaian Masalah PNS			Pembinaan Disiplin ASN			√	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin ASN	
						Evaluasi Disiplin ASN			√	Jumlah kegiatan evaluasi disiplin ASN	
						Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			√	Jumlah SK Pelanggaran Disiplin ASN	
						Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			√	Jumlah SK Izin Perceraian Pegawai	
4	Program Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					√	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	Mengevaluasi jumlah ASN yang lulus pengembangan kompetensi
			Penyelenggaraan Diklat Aparatur Sipil Negara		Pengembangan Kompetensi Teknis					Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis	

						Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				Jumlah dokumen analisis Kebutuhan Diklat Teknis	
			Pengembangan dan Peningkatan Mutu Diklat			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum			√	Jumlah penyelenggaraan Diklat Teknis bagi Jabatan Administrasi	
						Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum			√	Jumlah kegiatan evaluasi Diklat Teknis	
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional			√	Jumlah dokumen analisis Kebutuhan Diklat Manajerial dan Fungsional	

						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional			√	Jumlah penyelenggaraan Diklat Manajerial dan Fungsional	
						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional			√	Jumlah kegiatan Evaluasi Diklat Manajerial dan Fungsional	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Progran dan kegiatan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas lebih banyak mengarah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan administrasi Pemerintah, guna meningkatkan Kualitas ASN yang mengarah pada sasaran :

1. Meningkatnya kompetensi ASN.
2. Meningkatnya kualitas kinerja Dan Disiplin ASN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis serta tantangan dan perkembangan perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas, dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mengarah pada manajemen Aparatur Sipil Negara dalam mendukung Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas untuk mencapai visi pembangunan daerah 2018 – 2023 “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri” Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas akan mendukung MISI ke 1 yaitu *Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat*. Mengacu pada visi misi pembangunan Kabupaten Banyumas tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas adalah Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif dengan sasaran :

- Meningkatnya kompetensi ASN.
- Meningkatnya kualitas kinerja ASN

3.2 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja tahun 2021

A. Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019 Program penunjang fungsi Kepegawaian : Program Kepegawaian Daerah

Program penunjang fungsi Pendidikan dan Pelatihan : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Mebeulair
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pengelolaan Data Kepegawaian

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

- Pengelolaan Mutasi ASN
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengelolaan Promosi ASN

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pembinaan Disiplin ASN
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Untuk mengetahui rekapitulasi usulan program dan kegiatan serta besaran perkiraan anggaran yang direncanakan tahun 2021 serta perkiraan maju tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022			
					Target	Rp.	Target	Rp.		
TOTAL						53973799098		92276880706	PAD	
Terwujudnya SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif			Indeks Profesionalitas ASN.	%	71	53973799098	71	92276880706	PAD	
	Meningkatnya kualitas kinerja ASN		Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja kategori BAIK	%	100	52773799098	100	90972572706	PAD	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2653062500		2537893000	PAD	

			Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	%	95	2653062500	95	2537893000	PAD	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1605498500		1290329000	PAD	
			Jumlah ASN yang mengisi formasi jabatan sesuai penetapan formasi menpan RB	Orang	400	1605498500	500	1290329000	PAD	
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				0		0	PAD	

			jumlah usulan jabatan yang disusun	Usulan	1400	0	1500	0	PAD	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1549999500		1200000000	PAD	
			Jumlah formasi yang tersedia	Formasi	500	1549999500	500	1200000000	PAD	
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				25499000		30000000	PAD	
			Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	SK	500	25499000	500	30000000	PAD	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				15000000		30000000	PAD	
			Jumlah aplikasi kepegawaian yang tersedia	aplikasi	1	15000000	1	30000000	PAD	

		Pengelolaan Data Kepegawaian				15000000		30329000	PAD	
			Jumlah arsip kepegawaian yang dikelola	Arsip	11000	15000000	11000	30329000	PAD	
		Mutasi dan Promosi ASN				590000000		690000000	PAD	
			Jumlah ASN yang dimutasi dan dipromosikan	Orang	500	590000000	500	690000000	PAD	
		Pengelolaan Mutasi ASN				30000000		30000000	PAD	
			Jumlah SK Mutasi Pegawai yang diterbitkan	SK	200	30000000	200	30000000	PAD	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				185000000		185000000	PAD	
			Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	SK	1800	185000000	1800	185000000	PAD	

		Pengelolaan Promosi ASN				375000000		475000000	PAD	
			Jumlah kekosongan JPTP yang terisi	jabatan	3	375000000	7	475000000	PAD	
		Pengembangan Kompetensi ASN				230000000		330000000	PAD	
			Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	Orang	400	230000000	400	330000000	PAD	
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				200000000		300000000	PAD	
			Jumlah PNS yang dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Tugas Belajar, Ijin Belajar, Ijin Penggunaan Gelar)	Orang	200	200000000	300	300000000	PAD	

		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				30000000		30000000	PAD	
			Jumlah SK Pejabat Fungsional yang terbit	SK	350	30000000	350	30000000	PAD	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				227564000		227564000	PAD	
			Jumlah ASN yang nilai SKP nya baik	Orang	1100 0	227564000	1100 0	227564000	PAD	
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				60000000		60000000	PAD	
			Jumlah ASN yang mengirimkan evaluasi kinerja	Orang	1000 0	60000000	1000 0	60000000	PAD	

		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				5000000		5000000	PAD	
			Jumlah dokumen kegiatan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang disusun	Dokumen	1	5000000	1	5000000	PAD	
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				10200000		10200000	PAD	
			Jumlah pegawai yang menerima penghargaan	Orang	150	10200000	150	10200000	PAD	
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai				0		0	PAD	
			Jumlah ASN yang menerima tanda jasa	Orang	0	0	1	0	PAD	

		Pembinaan Disiplin ASN				46000000		46000000	PAD	
			Jumlah kegiatan pembinaan disiplin ASN yang dilaksanakan	Keg	10	46000000	10	46000000	PAD	
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				30364000		30364000	PAD	
			Jumlah SK Pelanggaran Disiplin ASN yang diterbitkan	SK	10	30364000	10	30364000	PAD	
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				76000000		76000000	PAD	
			Jumlah SK Izin Perceraian Pegawai yang diterbitkan	SK	40	76000000	40	76000000	PAD	

		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5012073659 8		8843467970 6	PAD	
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	30000000	100	60000000	PAD	
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30000000		60000000	PAD	

			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokume n	4	30000000	4	60000000	PAD	
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0	PAD	
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokume n	0	0	0	0	PAD	
		X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

		X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30000000		60000000	PAD	
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokume n	1	30000000	1	60000000	PAD	
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	4885136692 6	100	8671007539 5	PAD	

		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4885136692 6		8671007539 5	PAD	
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	4885136692 6	3	8671007539 5	PAD	
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4873496692 6		8662007539 5	PAD	
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjagannya	Orang	433	4873496692 6	433	8662007539 5	PAD	
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				116400000		90000000	PAD	
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	8	116400000	8	90000000	PAD	

			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	340098000	100	554604311	PAD	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			124148000		224604311	PAD	
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	124148000	3	224604311	PAD	
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			0		29604311	PAD	
			Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	0	0	5	29604311	PAD	
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			124148000		120000000	PAD	

			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	2	124148000	3	120000000	PAD	
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		75000000	PAD	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	0	0	2	75000000	PAD	
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				215950000		330000000	PAD	

			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	215950000	5	330000000	PAD	
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				65450000		70000000	PAD	
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	15	65450000	15	70000000	PAD	
		X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				0		20000000	PAD	
			Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	0	0	25	20000000	PAD	

		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45500000		40000000	PAD	
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	45500000	20	40000000	PAD	
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75000000		170000000	PAD	
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	2	75000000	2	170000000	PAD	

		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30000000		30000000	PAD	
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	10	30000000	15	30000000	PAD	
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	899271672	100	1110000000	PAD	
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				442651900		605000000	PAD	
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	442651900	6	605000000	PAD	

		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21496000		30000000	PAD	
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	5	21496000	5	30000000	PAD	
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				51000000		75000000	PAD	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5	51000000	5	75000000	PAD	
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30000000		30000000	PAD	

			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	5	30000000	5	30000000	PAD	
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				167650000		170000000	PAD	
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	167650000	12	170000000	PAD	
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				52460100		50000000	PAD	
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	100	25000000	100	25000000	PAD	
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	9153 4	27460100	8333 3	25000000	PAD	

		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120045800		250000000	PAD	
			Jumlah Koordinasi/Konsulta si dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	24	120045800	24	250000000	PAD	
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				456619772		505000000	PAD	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	456619772	3	505000000	PAD	

		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				199373772		200000000	PAD	
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	199373772	12	200000000	PAD	
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		250000000	PAD	
			Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	0	0	2	250000000	PAD	
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				257246000		280000000	PAD	

			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	10	257246000	10	280000000	PAD	
	Meningkatnya kompetensi ASN		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	%	100	1200000000	100	1304308000	PAD	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1200000000		1304308000	PAD	
			Prosentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan kebutuhan	%	0.8	1200000000	0.8	1304308000	PAD	
		Pengembangan Kompetensi Teknis				0		100000000	PAD	

			Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis	Orang	100	0	100	100000000	PAD	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				0		100000000	PAD	

			Jumlah ASN yang lulus penyelenggaraan Diklat Teknis bagi Jabatan Administrasi	Orang		0	40	100000000	PAD	
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1200000000		1204308000	PAD	
			Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Manajerial dan Fungsional	Orang	60	1200000000	377	1204308000	PAD	

		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1200000000		1204308000	PAD	
			Jumlah ASN yang lulus penyelenggaraan Diklat Manajerial dan Fungsional	Orang	60	1200000000	377	1204308000	PAD	

BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas merupakan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 merupakan penjabaran arah kebijakan pembangunan dibidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan aparatur sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Agar pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dapat berjalan dengan efektif, maka perlu dikembangkan suatu rencana yang menyeluruh, terjadwal dan transparan serta didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang memadai. Peran masyarakat atau stakeholder yang lain adalah sangat kami butuhkan sebagai fungsi kontrol yang positif bagi perencanaan kinerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas untuk Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara sesuai dengan yang diharapkan.

Purwokerto, Oktober 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS**



Drs. ACHMAD SUPARTONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19620708 198503 1 011